

Wacana Ideologi Perlawanan dalam Tuntutan Rakyat di Media Sosial: Perspektif Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

Suriadi

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

suriadi@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana ideologi perlawanan rakyat direproduksi dalam wacana “8 Tuntutan Rakyat” yang beredar di media sosial selama aksi nasional Agustus–September 2025. Masalah penelitian berangkat dari meningkatnya penggunaan ruang digital sebagai arena artikulasi politik publik di tengah krisis legitimasi kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, penelitian ini memadukan analisis struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial untuk menguraikan bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen ideologis dalam pembentukan kesadaran kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana “8 Tuntutan Rakyat” mengartikulasikan empat domain ideologi utama: anti-korupsi dan moralitas kekuasaan, reformasi institusional dan desentralisasi kekuasaan, keadilan ekonomi dan kebijakan publik inklusif, serta hak asasi manusia dan demokrasi partisipatif. Secara tekstual, struktur kalimat imperatif dan diksi evaluatif memperkuat legitimasi moral rakyat dalam menuntut perubahan; secara kognitif, wacana tersebut mencerminkan kesadaran kolektif mengenai urgensi pemulihan nilai moral dan keadilan sosial; dan secara sosial, wacana tersebut berfungsi sebagai arena simbolik yang menantang dominasi politik serta memperjuangkan otonomi moral dalam struktur kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa dalam wacana digital rakyat tidak hanya merepresentasikan perlawanan, tetapi juga membangun fondasi legitimasi moral baru bagi demokrasi Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan model multidimensi Van Dijk dalam studi aktivisme digital, sedangkan secara empiris memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana wacana rakyat membentuk resistensi politik melalui praktik bahasa.

Kata Kunci: *Analisis Wacana Kritis, Ideologi Perlawanan, Demokrasi Partisipatif, Moralitas Kekuasaan, Aktivisme Digital*

Pendahuluan

Media sosial dalam satu dekade terakhir telah menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menegosiasikan kekuasaan dan mengekspresikan ideologi perlawanan. Ruang digital kini berfungsi sebagai ruang publik alternatif tempat rakyat membangun narasi tandingan terhadap wacana dominan negara dan elite politik. Fenomena global seperti gerakan #EndSARS di Nigeria (Bodunrin & Matsilele, 2024), protes #MahsaAmini dan gerakan *Woman/Life/Freedom* di Iran (Bouvier & Jin, 2025; Izadi & Dryden, 2024) serta keterhubungan jaringan sosial digital yang mendorong partisipasi politik di Rusia (Kopacheva et al., 2023) menunjukkan bagaimana media sosial memfasilitasi partisipasi politik rakyat dan solidaritas lintas batas dalam menentang represi kekuasaan. Dalam konteks kebijakan publik, Irarrazaval et al. (2023) menguraikan bahwa protes sosial di Chile berpengaruh terhadap legitimasi negara dalam proses *Environmental Impact Assessment* melalui tekanan masyarakat terhadap mekanisme pengambilan keputusan.

Sementara itu, studi *Dono et al. (2025)* menegaskan bahwa persepsi efikasi politik dan represi terhadap protes berpengaruh langsung terhadap motivasi individu untuk terlibat dalam aktivisme, baik dalam bentuk normatif maupun non-normatif. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran moral dan keyakinan terhadap efektivitas tindakan politik menjadi pendorong utama mobilisasi rakyat dalam menghadapi ketidakadilan. Di Indonesia, fenomena serupa tampak dalam “8 Tuntutan Rakyat”, sebuah gerakan digital yang merepresentasikan kekecewaan publik terhadap korupsi, oligarki politik, dan lemahnya akuntabilitas negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial kini berperan sebagai arena ideologis bagi pembentukan kesadaran politik dan moral rakyat terhadap kekuasaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aktivisme digital dan resistensi ideologis dengan fokus dan pendekatan yang beragam. *Etim et al. (2025)* memperlihatkan bahwa ruang digital mampu mengubah warga tanpa kuasa menjadi agen politik aktif. *Peng et al. (2024)* menyoroti bagaimana jurnalisme aktivis digital dapat menantang narasi dominan negara melalui produksi wacana tandingan. *Themistocleous (2021)* menggambarkan pergeseran ruang protes dari fisik ke digital yang memunculkan bentuk baru solidaritas dan partisipasi public. *Aminu (2023)* menegaskan bagaimana polarisasi “kami–mereka” dibangun dalam wacana separatisme digital sebagai strategi pembentukan identitas ideologis. Di sisi lain, *Chiluwa & Ruzaita (2025)* menunjukkan bagaimana retorika politik dan moralitas digunakan dalam konflik Rusia–Ukraina untuk membangun legitimasi kekuasaan. Sementara itu, *Abbas et al. (2025)* menemukan bahwa media memainkan peran ganda dalam melegitimasi dan mendelegitimasi protes publik, bergantung pada kerangka wacana yang digunakan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa bahasa, simbol, dan emosi digital menjadi perangkat utama dalam membentuk wacana perlawanan di era media sosial.

Meskipun memberikan kontribusi penting, studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan baik secara teoretis maupun kontekstual. Sebagian besar penelitian berfokus pada konteks global seperti Nigeria, Iran, Tiongkok, dan Chile, sehingga belum mengulas secara mendalam karakter ideologi perlawanan di Indonesia sebagai negara demokrasi pascareformasi yang kompleks dan dinamis. Banyak penelitian juga bersifat deskriptif, menyoroti ekspresi digital dan simbolisme moral tanpa menelusuri struktur ideologis dan relasi kuasa yang melatarbelakanginya. Misalnya, *Bouvier & Jin (2025)* menekankan aspek performatif dan moralitas dalam aktivisme digital, sedangkan *Themistocleous (2021)* lebih menyoroti dinamika ruang publik tanpa membahas ideologi yang dikandungnya. Kajian seperti *Aminu (2023)* dan *Chiluwa & Ruzaita (2025)* memang membahas strategi retorik dan konstruksi identitas, tetapi belum menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) *Teun A. van Dijk* yang dapat menjelaskan keterkaitan antara struktur teks, kognisi sosial, dan konteks kekuasaan secara sistematis. Dengan demikian, masih terdapat celah konseptual untuk menelaah bagaimana ideologi perlawanan rakyat di Indonesia dikonstruksi melalui praktik wacana digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Wacana Ideologi Perlawanan dalam Tuntutan Rakyat di Media Sosial” dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model *Teun A. van Dijk (1997, 2008, 2009)*. Model ini menautkan tiga dimensi utama—struktur teks, kognisi sosial, dan konteks kekuasaan—dalam menganalisis bagaimana wacana digital rakyat memproduksi dan menantang legitimasi kekuasaan negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana struktur wacana ideologi perlawanan dibangun dalam teks “8 Tuntutan Rakyat”; (2) bagaimana wacana tersebut membentuk kesadaran kolektif rakyat terhadap ketimpangan kekuasaan; dan (3) bagaimana wacana digital tersebut

berfungsi sebagai praktik ideologis yang menegosiasikan dominasi simbolik negara. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur analisis wacana kritis dalam konteks aktivisme digital di Asia Tenggara, sementara secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami politik bahasa dan demokrasi digital sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap hegemoni kekuasaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model multidimensi Teun A. van Dijk (1997, 2008, 2009). Desain ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana ideologi perlawanan rakyat dikonstruksi dan disebarkan melalui wacana digital. Pendekatan Van Dijk memandang wacana sebagai praktik sosial yang berperan dalam mereproduksi atau menantang relasi kekuasaan melalui tiga lapisan utama: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks kekuasaan. Dengan demikian, desain ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis keterkaitan antara bentuk linguistik, struktur pengetahuan kolektif, dan situasi sosial-politik yang melatarbelakangi produksi wacana digital rakyat. Desain kualitatif ini dinilai paling tepat karena menekankan pemahaman makna ideologis di balik bahasa dan simbol, bukan sekadar kuantifikasi atau pengukuran frekuensi kemunculan kata.

Subjek penelitian ini adalah tuntutan rakyat yang muncul di media sosial selama periode 28–30 Agustus 2025 serta aksi lanjutan hingga September 2025. Data tersebut dirangkum dari poster dan unggahan dari @salsaer, @jeromepolin, dan @cherylmarella yang menjadi agregator opini publik; pernyataan 211 organisasi masyarakat sipil yang diunggah melalui laman YLBHI; siaran Pers PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia); Pernyataan Sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia; Rilis Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia; Teks Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025; dan “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” oleh gerakan Reformasi Indonesia di Change.org. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi digital. Poster diunduh dari Instagram kemudian ditranskripsi secara verbatim. Instrumen utama penelitian adalah lembar analisis wacana berbasis Van Dijk, yang berfungsi untuk mencatat unsur linguistik (struktur teks), elemen ideologis (kognisi sosial), serta konteks sosial-politik yang direpresentasikan dalam teks.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tiga tahapan utama sesuai model multidimensi Van Dijk (1997, 2008, 2009):

1. Analisis Struktur Teks

Seluruh data disegmentasi menjadi unit analisis berupa klausa atau subklausa tematik. Analisis dilakukan terhadap mikrostruktur (pilihan kata, modalitas, strategi retorik) dan macrostructure (tema utama) untuk mengidentifikasi pola representasi ideologis seperti rakyat vs. negara, keadilan vs. kekuasaan, dan publik vs. elit.

2. Analisis Kognisi Sosial

Mengacu pada konsep kognisi sosial Van Dijk (2008), tahap ini menelusuri bagaimana representasi mental kolektif rakyat terbentuk melalui pengalaman sosial dan bagaimana persepsi terhadap ketimpangan kekuasaan direpresentasikan dalam wacana digital.

3. Analisis Konteks Sosial

Analisis diarahkan untuk menempatkan hasil linguistik dan kognitif dalam struktur sosial yang lebih luas, mencakup ideologi, lembaga, dan relasi kuasa yang melatarbelakangi produksi wacana. Tahap ini menyoroti bagaimana wacana digital berfungsi sebagai praktik diskursif resistif yang menantang dominasi simbolik negara.

Hasil

Analisis data ini menelaah konstruksi ideologi perlawanan rakyat dalam wacana “8 Tuntutan Rakyat” sebagai strategi linguistik yang mengungkap ketimpangan kekuasaan dan perjuangan legitimasi moral di ruang digital. Dengan menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, bahasa dipahami sebagai medium kognitif dan ideologis yang merepresentasikan kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan sosial sekaligus membentuk identitas politik rakyat sebagai subjek demokratis. Hasil analisis menunjukkan empat domain ideologis utama berikut.

Ideologi Anti-Korupsi dan Moralitas Kekuasaan

Ideologi ini berpijak pada keyakinan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab publik. Korupsi dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk penyimpangan etika yang merusak tatanan sosial dan legitimasi politik. Ideologi ini menempatkan moralitas sebagai dasar keabsahan kekuasaan dan menolak segala bentuk privilese yang melanggengkan penyalahgunaan wewenang. Fokus utamanya adalah pemurnian nilai-nilai kekuasaan agar negara tunduk pada etika publik dan prinsip keadilan.

Tuntutan 1: Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

Tuntutan 4: Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Data tuntutan di atas menampilkan ideologi anti-korupsi dan moralitas kekuasaan yang menjadi inti dari perlawanan rakyat terhadap penyimpangan etika politik dan dominasi elite negara. Pada tataran struktur teks, kedua tuntutan memperlihatkan penggunaan bahasa yang bersifat imperatif, langsung, dan sarat dengan otoritas moral. Pilihan leksikal seperti *audit independen*, *hapus perlakuan istimewa*, *tolak mantan koruptor*, serta *tegakkan* dan *sahkan* membentuk wacana yang menyerukan tindakan korektif dan pembenahan sistem kekuasaan. Bentuk kalimat yang tegas dan berorientasi aksi menegaskan posisi rakyat sebagai sumber legitimasi moral yang menuntut pertanggungjawaban dari lembaga legislatif dan hukum. Secara wacana, oposisi antara rakyat bermoral dan elite korup menjadi fondasi ideologis yang memosisikan bahasa sebagai sarana artikulasi nilai etis dan pembalikan relasi kuasa dalam ruang publik.

Pada tataran kognisi sosial, kedua tuntutan mencerminkan kesadaran kolektif rakyat mengenai korupsi sebagai bentuk krisis nilai yang melampaui pelanggaran hukum. Dalam persepsi bersama yang terbentuk melalui pengalaman sosial-politik, korupsi dipahami sebagai kegagalan moral yang menggerus kepercayaan publik dan menyingkap jarak antara penguasa dan warga negara. Kesadaran ini melahirkan pandangan bahwa integritas moral harus menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan. Melalui wacana perlawanan ini, rakyat mengonstruksi diri mereka sebagai penjaga nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab publik. Kognisi sosial semacam ini tidak hanya memperkuat solidaritas moral di antara warga, tetapi juga menandai proses transformasi kesadaran politik, dari kepatuhan terhadap otoritas formal menuju penegasan hak moral rakyat untuk menilai dan menuntut keadilan.

Pada tataran konteks sosial, kemunculan kedua tuntutan berkaitan erat dengan situasi politik yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan

menguatnya praktik oligarki. Kondisi sosial tersebut menumbuhkan kebutuhan untuk menegakkan kembali prinsip etika publik sebagai dasar demokrasi. Dalam konteks ini, ideologi anti-korupsi berfungsi sebagai wacana perlawanan terhadap normalisasi penyimpangan dan praktik impunitas pejabat publik. Seruan untuk reformasi DPR dan pengesahan undang-undang perampasan aset menggambarkan upaya rakyat untuk mengembalikan keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme moral, bukan sekadar hukum positif. Wacana ini menunjukkan pergeseran paradigma demokrasi: legitimasi kekuasaan tidak lagi bersandar pada posisi institusional, melainkan pada tanggung jawab moral terhadap rakyat. Dengan demikian, ideologi anti-korupsi dan moralitas kekuasaan dalam kedua tuntutan ini berperan sebagai strategi diskursif untuk memulihkan etika publik dan menegakkan kembali makna moralitas sebagai dasar legitimasi kekuasaan di Indonesia.

Ideologi Reformasi Institusional dan Desentralisasi Kekuasaan

Ideologi ini menekankan pentingnya restrukturisasi lembaga negara untuk menciptakan keseimbangan dan distribusi kekuasaan yang lebih adil. Kekuasaan dianggap harus diawasi dan dibatasi agar tidak terpusat pada satu entitas atau elite politik. Ideologi ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang efektif sebagai syarat utama tegaknya demokrasi substantif. Tujuan akhirnya adalah membangun tatanan politik yang partisipatif, efisien, dan terbebas dari praktik otoritarianisme birokratis

Tuntutan 2: Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.

Tuntutan 5: Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis.

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

Tuntutan 6: TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Data tuntutan di atas menampilkan ideologi reformasi institusional dan desentralisasi kekuasaan sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap sentralisasi otoritas politik dan lemahnya kontrol publik terhadap lembaga negara. Pada tataran struktur teks, ketiga tuntutan menggunakan diksi yang bersifat normatif, direktif, dan berorientasi pada pembenahan sistem kekuasaan. Kata kunci seperti *reformasi*, *kuatkan*, dan *desentralisasi* menandai bentuk wacana yang menyerukan redistribusi wewenang dan akuntabilitas lembaga negara. Pilihan frasa seperti *oposisi berfungsi sebagaimana mestinya*, *kepemimpinan profesional dan humanis*, serta *tanpa pengecualian* memperlihatkan struktur kalimat yang menolak monopoli kekuasaan dan mengusung prinsip keterbukaan serta pengawasan publik. Secara keseluruhan, wacana ini mengandung struktur moral dan politik yang menegaskan tuntutan agar kekuasaan dijalankan secara transparan, terbatas, dan bertanggung jawab terhadap rakyat, bukan terhadap elite atau institusi yang menguasai sumber otoritas.

Pada tataran kognisi sosial, ketiga tuntutan tersebut merefleksikan kesadaran kolektif rakyat bahwa demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan. Melalui pengalaman historis dan sosial, terbentuk pandangan bersama bahwa partai politik, lembaga eksekutif, kepolisian, dan militer telah melampaui batas fungsinya sebagai pelayan publik dan berubah menjadi entitas yang melanggar kekuasaan. Kesadaran ini menumbuhkan gagasan bahwa reformasi kelembagaan tidak

hanya menyangkut aspek hukum dan tata kelola, tetapi juga perubahan nilai dan perilaku dalam struktur pemerintahan. Masyarakat menempatkan diri sebagai pengawas moral terhadap sistem politik yang selama ini tertutup dan tidak akuntabel. Dalam kerangka ini, ideologi reformasi institusional berfungsi sebagai bentuk kesadaran kritis yang menuntut pemulihan prinsip keadilan prosedural, profesionalisme birokrasi, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dalam pengelolaan kekuasaan negara.

Pada tataran konteks sosial, ketiga tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi politik yang ditandai oleh lemahnya fungsi oposisi, penyalahgunaan wewenang, serta keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil. Realitas tersebut menandakan kerapuhan sistem demokrasi yang masih terperangkap dalam pola hubungan patronase antara kekuasaan politik dan lembaga negara. Dalam konteks tersebut, wacana reformasi kelembagaan menjadi instrumen ideologis untuk menegaskan supremasi rakyat atas kekuasaan yang koersif dan eksklusif. Seruan untuk membatasi peran militer, mereformasi kepolisian, dan memperkuat pengawasan eksekutif menggambarkan keinginan rakyat untuk mengembalikan keseimbangan dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, ideologi reformasi institusional dan desentralisasi kekuasaan dalam tuntutan ini berfungsi sebagai strategi perlawanan diskursif yang menolak dominasi satu arah, menegaskan akuntabilitas publik, dan menegaskan kembali prinsip demokrasi substantif sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Ideologi Keadilan Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif

Ideologi ini berakar pada gagasan bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi dasar kebijakan negara, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dipahami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang perlu diperbaiki melalui redistribusi sumber daya dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ideologi ini menolak sistem ekonomi yang eksploitatif dan menuntut keadilan distributif yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Nilai utamanya terletak pada solidaritas sosial, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab negara terhadap keadilan ekonomi rakyat.

Tuntutan 3: *Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil*

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Tuntutan 8: *Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan*

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Data tuntutan di atas menampilkan ideologi keadilan ekonomi dan kebijakan publik yang inklusif sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pada tataran struktur teks, kedua tuntutan menggunakan struktur kalimat imperatif dengan diksi yang menekankan urgensi dan koreksi terhadap kebijakan negara. Pilihan kata seperti *reformasi*, *adil*, *batalkan rencana kenaikan pajak*, *evaluasi*, dan *audit tata kelola BUMN* memperlihatkan strategi linguistik yang bersifat evaluatif dan menantang. Melalui oposisi semantik seperti *rakyat terbebani* versus *negara eksploitatif*, wacana ini membentuk representasi ideologis bahwa ketimpangan ekonomi bukan akibat alami, melainkan hasil dari keputusan politik yang memihak elite. Dengan demikian, struktur bahasa dalam kedua tuntutan tersebut berfungsi untuk mengartikulasikan kesadaran ekonomi rakyat sebagai subjek politik yang menolak dominasi kebijakan neoliberal dan menuntut redistribusi keadilan sosial.

Pada tataran kognisi sosial, kedua tuntutan mencerminkan pemahaman kolektif rakyat mengenai ketidakadilan ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan yang mengabaikan prinsip keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Melalui pengalaman sosial yang panjang, terbentuk pengetahuan bersama bahwa kebijakan fiskal dan ekonomi sering kali menekan kelompok rentan, sementara melindungi kepentingan korporasi besar dan elite ekonomi. Kesadaran ini memunculkan pandangan bahwa negara seharusnya menjadi penjamin kesejahteraan, bukan instrumen eksploitasi. Dalam konteks ini, rakyat memaknai keadilan ekonomi sebagai hak dasar yang harus diwujudkan melalui sistem perpajakan progresif, perlindungan terhadap buruh, serta tata kelola sumber daya yang transparan. Ideologi keadilan ekonomi yang tercermin dari kognisi sosial ini menegaskan nilai solidaritas sosial dan distribusi yang merata sebagai landasan moral bagi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Pada tataran konteks sosial, kedua tuntutan lahir dari kondisi ekonomi yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan, marjinalisasi buruh, dan lemahnya akuntabilitas kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada investasi besar dan efisiensi pasar sering kali mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi. Dalam situasi ini, wacana keadilan ekonomi berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi yang menindas dan memperkuat sistem politik yang berpihak pada kepentingan modal. Seruan dalam wacana tersebut menjadi representasi dari upaya rakyat untuk menuntut perubahan arah kebijakan menuju distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, ideologi keadilan ekonomi dan kebijakan publik yang inklusif dalam kedua tuntutan ini mencerminkan perjuangan rakyat untuk membangun tatanan ekonomi yang berbasis kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Ideologi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Partisipatif

Ideologi ini didasarkan pada prinsip bahwa kebebasan, martabat manusia, dan partisipasi publik merupakan fondasi dari kehidupan bernegara yang demokratis. Setiap warga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ideologi ini menolak segala bentuk penindasan, pelanggaran hak sipil, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat yang setara, terbuka, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta nilai kemanusiaan sebagai pilar demokrasi.

Tuntutan 7: Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

Data tuntutan di atas menampilkan ideologi hak asasi manusia dan demokrasi partisipatif sebagai wujud perlawanan rakyat terhadap lemahnya perlindungan kebebasan sipil dan akuntabilitas lembaga negara. Pada tataran struktur teks, tuntutan tersebut menggunakan konstruksi kalimat imperatif yang tegas dengan pilihan kata yang menekankan penguatan institusional dan tanggung jawab moral negara terhadap warga. Diksi seperti *perkuat*, *revisi*, dan *perluas kewenangan* menunjukkan intensi korektif dan dorongan reformasi terhadap sistem hukum yang dianggap tidak efektif. Frasa *memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi* dan *memperkuat Ombudsman serta Kompolnas* menandakan strategi linguistik yang menggabungkan dimensi moral dan institusional dalam satu kesatuan wacana. Secara makro, struktur teks ini membangun relasi simbolik antara rakyat sebagai penjaga nilai kemanusiaan dan negara sebagai entitas yang harus tunduk pada prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, wacana ini berfungsi sebagai artikulasi linguistik yang menegaskan hak rakyat untuk

mengawasi kekuasaan dan memperkuat ruang partisipasi demokratis dalam struktur kenegaraan.

Pada tataran kognisi sosial, tuntutan ini merefleksikan kesadaran kolektif bahwa perlindungan hak asasi dan kebebasan berekspresi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi. Pengalaman sosial tentang pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya respons lembaga pengawas membentuk pengetahuan bersama bahwa institusi negara belum mampu menjamin hak-hak dasar warga. Kesadaran ini melahirkan pandangan bahwa demokrasi tidak cukup dijaga melalui prosedur elektoral, tetapi harus ditegakkan melalui mekanisme pengawasan independen yang memberi ruang bagi partisipasi publik. Dalam kognisi sosial ini, rakyat memposisikan diri sebagai subjek etis dan politik yang memiliki hak untuk menuntut keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ideologi hak asasi dan demokrasi partisipatif menjadi wadah bagi kesadaran bahwa kebebasan berekspresi adalah sarana utama untuk mempertahankan keadilan sosial dan mengoreksi penyimpangan kekuasaan.

Pada tataran konteks sosial, tuntutan ini muncul dari situasi politik yang memperlihatkan menurunnya komitmen pemerintah terhadap prinsip hak asasi manusia dan meningkatnya praktik pembatasan kebebasan berekspresi. Kelemahan lembaga pengawas publik dan intervensi politik dalam proses hukum telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan HAM. Dalam kondisi tersebut, wacana penguatan lembaga independen menjadi instrumen ideologis untuk menegaskan kembali pentingnya supremasi hukum dan pengawasan rakyat terhadap kekuasaan. Seruan untuk memperkuat Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas mencerminkan upaya rakyat untuk memperluas ruang demokrasi partisipatif yang menjamin transparansi serta akuntabilitas negara. Dengan demikian, ideologi hak asasi dan demokrasi partisipatif dalam tuntutan ini berfungsi sebagai strategi diskursif untuk meneguhkan nilai kemanusiaan, memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan, serta membangun kembali legitimasi moral negara berdasarkan penghormatan terhadap hak warga dan keadilan sosial.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa wacana ideologi perlawanan rakyat dalam “8 Tuntutan Rakyat” merupakan ekspresi politik yang menegaskan perjuangan moral dan sosial terhadap ketimpangan kekuasaan negara. Berdasarkan kerangka Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, bahasa dalam wacana digital rakyat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk menegosiasikan ulang legitimasi kekuasaan. Pada tataran struktur teks, penggunaan bentuk imperatif seperti *reformasi*, *hapus*, *tegakkan*, dan *perkuat* menunjukkan karakter bahasa yang performatif dan mengandung daya desak moral. Pilihan diksi tersebut menandai bahasa sebagai tindakan sosial yang menuntut perubahan nyata, bukan sekadar penyampaian gagasan. Pola oposisi semantik seperti *rakyat bermoral* versus *elite korup*, *rakyat tertindas* versus *negara eksploitatif*, serta *kekuasaan koersif* versus *demokrasi partisipatif* memperlihatkan bahwa struktur bahasa menjadi medan ideologis yang memperjuangkan pemulihan etika publik dan redistribusi kuasa. Temuan ini mendukung pandangan Van Dijk (2009) bahwa bahasa merupakan sarana utama dalam produksi dan transformasi kekuasaan melalui makna yang diperebutkan secara sosial.

Keterkaitan antara temuan dan teori Van Dijk tampak melalui interaksi antara struktur teks, kognisi sosial, dan konteks kekuasaan. Pada tingkat kognitif, wacana rakyat membangun model pengetahuan bersama bahwa ketidakadilan struktural dan korupsi

politik bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan akibat dari krisis nilai dan disfungsi moral dalam kekuasaan negara. Rakyat menempatkan diri sebagai agen moral yang memiliki hak untuk menilai, mengoreksi, dan menuntut tanggung jawab publik. Kesadaran kolektif ini memperlihatkan transformasi dari posisi pasif menuju subjek yang berdaya secara simbolik. Hal ini memperkuat gagasan Van Dijk (2008) bahwa praktik wacana merefleksikan representasi mental kolektif yang menentukan bagaimana masyarakat memahami dan merespons struktur dominasi. Dengan demikian, perlawanan rakyat dalam konteks ini merupakan manifestasi kognitif dari kesadaran etis yang menolak bentuk kekuasaan yang tidak berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dan kontras dengan beberapa studi terdahulu. Sejalan dengan temuan Bouvier dan Jin (2025), bahasa perlawanan di media sosial berfungsi sebagai arena moral untuk memperkuat solidaritas publik dan membentuk identitas politik yang kritis. Namun, berbeda dari studi tersebut yang berfokus pada ekspresi emosional dalam konteks Iran, wacana “8 Tuntutan Rakyat” menampilkan corak rasional dan institusional melalui seruan reformasi hukum, kelembagaan, dan kebijakan publik. Temuan ini juga memperluas hasil penelitian Irarrazaval et al. (2023) tentang pengaruh protes sosial terhadap legitimasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa wacana digital tidak hanya memberi tekanan pada pemerintah, tetapi juga membangun kerangka ideologis rakyat yang menuntut perubahan nilai dasar dalam kekuasaan. Selain itu, hasil ini menantang pandangan Abbas et al. (2025) yang menilai protes digital mudah terserap oleh media arus utama. Dalam kasus Indonesia, wacana tuntutan rakyat justru menunjukkan otonomi simbolik yang kuat, karena artikulasi makna politik dikonstruksi dan disebarkan oleh warga tanpa mediasi institusional.

Secara ideologis, temuan penelitian ini mengungkap dua kecenderungan utama dalam dinamika wacana perlawanan rakyat, yaitu pemberdayaan dan pembungkaman. Bahasa tuntutan yang menyerukan reformasi DPR, pengesahan undang-undang perampasan aset, atau desentralisasi kekuasaan memperlihatkan pemberdayaan simbolik rakyat melalui moralitas publik sebagai sumber legitimasi baru. Bahasa menjadi sarana untuk memulihkan keadilan, menegaskan hak kolektif, dan menantang otoritas yang dianggap menyimpang. Namun, ideologi perlawanan ini juga menghadapi bentuk pembungkaman halus melalui mekanisme hegemonik seperti regulasi digital, kooptasi wacana, dan manipulasi makna dalam media resmi. Tuntutan reformasi sering diadaptasi oleh negara sebagai slogan administratif tanpa esensi perubahan, menunjukkan adanya proses domestikasi makna perlawanan ke dalam wacana kekuasaan. Temuan ini menegaskan pandangan Van Dijk (2008) tentang dominasi kognitif, yakni kemampuan kekuasaan untuk mengendalikan persepsi dan interpretasi publik tanpa menggunakan kekerasan langsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa wacana digital rakyat merupakan medan politik simbolik tempat ideologi perlawanan beroperasi antara kesadaran kritis dan tekanan hegemonik. Bahasa menjadi medium utama bagi rakyat untuk menegaskan haknya dalam mendefinisikan keadilan dan kebenaran, sementara kekuasaan berusaha mempertahankan dominasinya dengan mengontrol wacana publik. Dalam konteks Indonesia kontemporer, temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan rakyat untuk mempertahankan otonomi wacana dan moralitas publik sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membuktikan relevansi teori Van Dijk dalam membaca praktik wacana politik digital, tetapi juga menegaskan bahwa

perjuangan ideologis rakyat berlangsung melalui bahasa sebagai arena utama perebutan makna dan kekuasaan.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa wacana “8 Tuntutan Rakyat” di media sosial merepresentasikan ideologi perlawanan rakyat terhadap ketimpangan kekuasaan dan krisis legitimasi moral negara. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, penelitian ini menemukan bahwa bahasa dalam wacana digital rakyat berfungsi sebagai instrumen ideologis yang menghubungkan struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam satu praktik resistensi terhadap hegemoni negara. Secara linguistik, bentuk kalimat imperatif, diksi moralistik, dan oposisi semantik seperti rakyat bermoral dan elite korup menegaskan karakter bahasa yang memuat daya desak dan legitimasi moral. Pada tingkat kognitif, wacana ini mencerminkan kesadaran kolektif rakyat bahwa kekuasaan yang sah harus berpijak pada integritas publik dan keadilan sosial, bukan sekadar legalitas formal. Sementara pada konteks sosial, praktik wacana digital berperan sebagai ruang simbolik tempat rakyat menegosiasikan kembali relasi kuasa dan menegaskan moralitas publik sebagai dasar baru legitimasi politik.

Temuan ini juga menegaskan bahwa ideologi perlawanan rakyat tidak hanya bersifat reaktif terhadap ketidakadilan, tetapi juga produktif dalam membangun tatanan nilai alternatif. Wacana perlawanan rakyat di media sosial memperlihatkan upaya kolektif untuk merekonstruksi makna kekuasaan melalui moralitas, transparansi, dan keadilan. Bahasa berperan bukan hanya sebagai medium representasi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang meneguhkan rakyat sebagai subjek etis dan politik. Meskipun demikian, ideologi perlawanan ini masih menghadapi bentuk pembungkaman melalui kontrol wacana, kooptasi makna, dan dominasi kognitif yang dilakukan oleh kekuasaan dan media. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan ideologis rakyat berlangsung dalam medan simbolik yang kompleks, dengan pemberdayaan dan pembungkaman yang berjalan beriringan.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena korpus data yang terbatas pada 8 teks digital dalam rentang waktu tertentu, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati. Meskipun begitu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan model multidimensi Van Dijk dalam konteks wacana digital Indonesia dan memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi arena utama perebutan makna kekuasaan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan analisis wacana kritis lintas platform dan pendekatan multimodal untuk memahami interaksi antara teks, visual, dan suara dalam pembentukan ideologi digital. Selain itu, studi longitudinal dapat dilakukan untuk menelusuri bagaimana wacana perlawanan rakyat berevolusi menjadi agenda politik dan kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mendorong penguatan ruang wacana demokratis yang berlandaskan moralitas publik, keadilan sosial, dan transparansi kekuasaan.

Daftar Pustaka

Abbas, A. H., Atatfa, O. A. W., Mohammed, S. H., & Kadim, E. N. (2025). Legitimation and de-legitimation of American pro-Gaza student protests: A critical discourse analysis. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102076. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102076>

- Aminu, P. (2023). Digital resistance: Discursive construction of polarization and otherness in Oduduwa secessionists' social media discourse. *Discourse & Society*, 35(1), 27-47. <https://doi.org/10.1177/09579265231194171>
- Bodunrin, I. A., & Matsilele, T. (2024). Social media and protest politics in Nigeria's #EndSARS campaign. In V. Benson (Ed.), *Handbook of social media in education, consumer behavior and politics* (pp. 109-122). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90237-3.00006-0>
- Bouvier, G., & Jin, S. (2025). Social media and the new canon of use for social protest: The case of cutting hair to show solidarity with the women of Iran. *Discourse, Context & Media*, 64, 100867. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2025.100867>
- Chiluwa, I., & Ruzaita, J. (2025). Analysing the language of political conflict: a study of war rhetoric of Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky. *Critical Discourse Studies*, 22(5), 477-493. <https://doi.org/10.1080/17405904.2024.2331186>
- Dono, M., Ayanian, A., & Tausch, N. (2025). *A fight against all odds? The causal effects of perceived political efficacy and protest repression on motivation to engage in normative and non-normative climate protest*. *Journal of Environmental Psychology*, 106, 102697. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102697>
- Etim, E., Fatile, J. O., Duke, J. E., Ibikunle, B. Q., & Duru, E. J. C. (2025). Digital activism and collective resistance to police brutality: Systematic review of the quieter and less visible narratives of #EndSARS protest. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101722. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101722>
- Izadi, D., & Dryden, S. (2024). Woman/life/freedom: The social semiotics behind the 2022 Iranian protest movement. *Discourse, Context & Media*, 60, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2024.100803>
- Irarrazaval, F., Stamm, C., Madariaga, A., Maillet, A., & Franetovic, G. (2023). Examining the effects of social protest on the environmental impact assessment process in Chile. *Environmental Impact Assessment Review*, 99, 107044. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107044>
- Kopacheva, E., Fatemi, M., & Kucher, K. (2023). Using social-media-network ties for predicting intended protest participation in Russia. *Online Social Networks and Media*, 37-38, 100273. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2023.100273>
- Peng, A. Y., Wu, C., & Sun, Y. (2024). Curating activist journalism to defy China's "mainstream" narrative on X (Twitter). *Critical Discourse Studies*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/17405904.2024.2430519>
- Themistocleous, C. (2021). From public to digital spaces: Spatial and media practices of the 2017 'Unite Cyprus Now' peace protests. *Discourse, Context & Media*, 42, 100504. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2021.100504>
- Van Dijk, T. A. (1997). *Discourse as structure and process*. Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Van Dijk, T. A. (2009). *Society and discourse: How social contexts influence text and talk*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.